

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 25 April 2003, SLA atau *Sudan Liberation Army*, kelompok pemberontak Darfur yang dibentuk oleh *Darfur Liberation Front* yang terdiri dari tiga suku etnik, Zaghawa, Fur, dan Masalit, menyerang pangkalan udara pemerintah Sudan di El Fasher, ibukota negara bagian Darfur Utara, serangan ini terjadi karena warga Darfur merasa Pemerintah Sudan menekan warga non-Arab yang mendominasi Darfur, serangan ini menghancurkan Antonov Bombers, senjata helikopter milik pemerintah Sudan, para pemberontak juga berhasil menyita sejumlah besar amunisi dan senjata berat, bagi pemerintah Sudan hal ini merupakan kekalahan besar, bahkan karenanya, Pemerintah yang merasa terpukul akan hal ini menolak berdialog dan bernegosiasi dengan pihak oposisi, para pemberontak sendiri menuntut akan adanya pengakuan sebagai gerakan politik dan meminta Pemerintah Sudan menyerahkan otonomi berupa sistem federal kepada Darfur, serangan juga dilakukan oleh JEM atau *Justice Equality Movement* kelompok pemberontak Darfur lainnya yang didominasi oleh Zaghawa, Pemerintah merespon hal ini dengan mengerahkan tentaranya, angkatan udara, dan pasukan yang direkrut dari suku-suku Arab di Darfur yang dikenal sebagai Janjaweed, hal inilah yang nantinya akan memperkeruh konflik anti non-Arab (Amnesti Internasional 2012).

PBB mengatakan lebih dari 2,7 juta orang telah meninggalkan rumah mereka dan kini tinggal di kamp-kamp di Darfur. Selanjutnya korban jiwa sendiri diprediksikan sebanyak 300.000 orang yang telah tewas karena dampak gabungan dari perang, kelaparan, dan penyakit. Angka ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Bashir yang menyebutkan korban tewas sejumlah 10.000 Jiwa, Presiden Bashir sendiri cenderung menutupi-nutupi jumlah korban jiwa karena Pemerintah Sudan sendiri ingin menutupi besarnya konflik ini, apalagi setelah Amerika mengatakan konflik ini sebagai Genosida (BBC 2010).

Pada bulan Mei 2004, Uni Afrika memediasi pemerintah Sudan dan pemberontak untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata di Addis Ababa. Perjanjian ini menjadi dasar untuk pembentukan misi Uni Afrika di Sudan, yang pada bulan Juli 2004 misi ini diubah menjadi pasukan penjaga perdamaian penuh. Sampai musim semi tahun 2005, PBB dan negara-negara barat, seperti US dan Inggris, tidak melibatkan diri dalam proses perdamaian Darfur. Namun, setelah penandatanganan perjanjian perdamaian komprehensif Darfur pada Januari 2005, perhatian masyarakat internasional beralih ke proses perdamaian Darfur, dan di bawah kepemimpinan PBB dan UA, negosiasi perdamaian Abuja kembali dimulai pada Juni 2005. Setelah berulang kali negosiasi diperpanjang, perundingan damai akhirnya menyimpulkan dengan penandatanganan *Darfur Peace Agreement* oleh pemerintah Sudan dan SLM / A di Abuja pada Mei 2006 (Beyond Intractability 2009).

Keadaan di Sudan, khususnya Darfur tidak kunjung membaik dari waktu ke waktu, sementara media secara gencar meliput konflik tersebut hingga akhirnya memancing PBB lewat Dewan Keamanannya mengeluarkan mandat yang mana berujung pada penurunan *Peacekeeping Operations* di konflik ini, adapun yang berhak mengeluarkan mandat yang mana dikenal sebagai negara pemegang veto di dalam DK PBB terdiri dari US, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina, bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1769 pada 31 Juli 2007 yang memutuskan bahwa UNAMID berwenang untuk menjalankan misi perdamaian di Darfur.

DK PBB (2007) sendiri menyatakan akan menurunkan *Peacekeeping Operations* yang dinamakan UNAMID yang merupakan gabungan dari Uni Afrika dan PBB yang berjumlah 19,248. Namun disini muncul suatu perdebatan terkait *Peacekeeping Operations* yang berbentuk *Hybrid*, UNAMID sendiri bagi warga Darfur membawa dampak positif, salah satunya yaitu dengan adanya kamp UNAMID yang banyak menjadi persinggahan bagi para warga Darfur yang tidak aman lagi di tempat tinggalnya, UNAMID juga memperbarui informasi dan memancing perhatian internasional atas apa yang terjadi di Darfur dengan laporan-laporannya, belum lagi UNAMID

memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, selimut, obat-obatan dan juga memperbaiki sekolah, dan beberapa infrastruktur lainnya (Refugee Right 2016).

Meskipun UNAMID melakukan beberapa tindakan positif seperti yang disebutkan tadi, tindakan-tindakan tersebut tidaklah cukup bahkan jauh dari cukup dalam mengatasi konflik di Darfur, untuk sebuah organisasi dunia seperti PBB, yang di dampingi Uni Afrika, maka ekspektasi akan UNAMID ini pastilah tinggi, belum lagi fakta bahwa UNAMID adalah *Peacekeeping Operations* terbesar di era ini, namun seiring waktu berjalan UNAMID makin terasa tidak efektif bahkan cenderung *'toothless'* seperti banyak diberitakan, UNAMID dinilai gagal melindungi warga sipil Darfur.

World Policy (2014) melansir dalam beritanya bahwa Darfur 'dikhianati' oleh PBB, penghianatan ini mengarah pada kasus pemerkosaan massal yang terjadi di Darfur dengan jumlah korban 200 perempuan dan anak-anak oleh Angkatan Bersenjata Sudan di Tabit, yang jaraknya 25 mil dari markas UNAMID di El Fasher, UNAMID juga gagal menginvestigasi kasus ini dengan keterlambatan mereka datang di Tabit yaitu sepuluh hari setelah peristiwa berlangsung, yang memberi waktu pelaku dalam memanipulasi kejadian, UNAMID sendiri berdalih hal ini dikarenakan ketidakadaannya laporan dari warga yang diasumsikan bahwa warga hidup harmonis dengan Angkatan Bersenjata Sudan, namun media sendiri membantah hal ini dengan mengeluarkan laporan internal yang berkontradiksi dengan pernyataan UNAMID. Majalah Foreign Policy (2015), juga melaporkan kegagalan UNAMID, yang salah satunya terjadi pada tahun 2013, UNAMID mendampingi tiga bus berisi warga Darfur yang akan menuju konferensi, namun di tengah jalan, mereka dihadang kelompok pemberontak yang mengarahkan bus menjauh dari jalan utama, dan kemudian para pemberontak merampok uang, ponsel, dan barang berharga lainnya, bukan hanya itu mereka juga menyandera para warga Darfur yang setelah enam hari kemudian diselamatkan oleh ICRC, peristiwa penculikan yang berlangsung tepat berada di bawah pengawasan UNAMID merupakan pukulan besar bagi PBB dan Uni Afrika, namun Nnadi, Pemimpin PKO berdalih bahwa para warga dan supir

bus pergi secara sukarela mengikuti pemberontak, namun pernyataan berbeda datang dari supir bus dan korban yang mengatakan UNAMID memberikan mereka pada pemberontak secara sukarela.

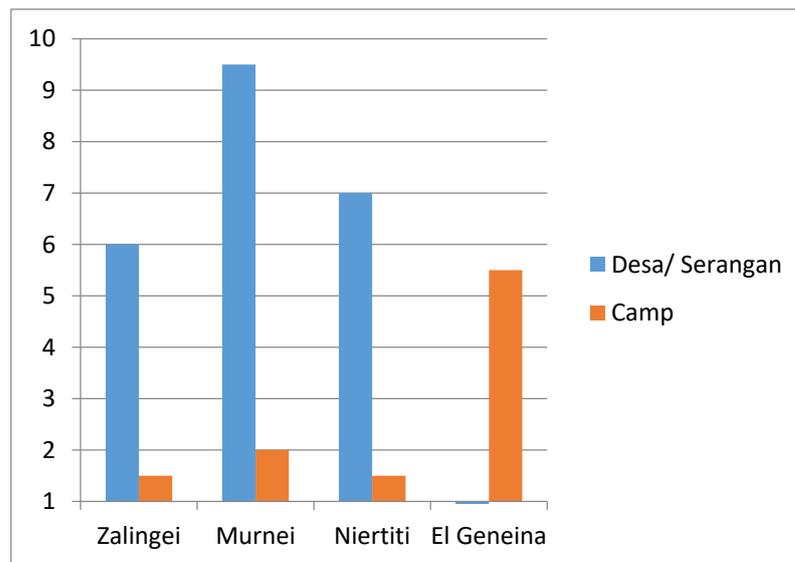
UNAMID yang merupakan gabungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Otonomi yang paling tinggi di dunia dan bersama Uni Afrika yang juga merupakan organisasi perserikatan terbesar di Afrika dengan mandatnya yang diturunkan tahun 2007 sampai pada 2017 masih gagal dalam tugas utamanya melindungi warga Negara sipil di Darfur. Darfur masih jauh dari aman apalagi dengan adanya penyerangan di desa-desa yang menimbulkan banyak korban yang berjatuhan, namun kamp juga tidak bisa dibilang sejahtera karena banyak kekuarangan logistik dan pangan, serta minimnya obat-obatan yang menimbulkan banyak warga yang tewas di kamp.

Berikut ini adalah angka kematian warga desa di Darfur baik yang berada di desa atau kamp menurut *mortality rate*.

Grafik 1.1

Angka Kematian Warga di Desa dan *Camp* diukur dengan

Mortality Rate



(Sumber: Center on Law and Globalization t.t.)

Mortality rate sendiri adalah pengukuran korban jumlah kematian per 10.000 perharinya, Melihat dari grafik 1.1, *mortality rate* atau angka kematian di Darfur nampak tidak baik, Data tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan warga selamat memang lebih besar ketika mereka mengungsi ke tenda karena banyak desa-desa yang dibantai, namun kematian angka di tenda-tenda penampungan juga terbilang tinggi, hal ini dikarenakan kurangnya logistik, hingga serangan pada warga di dekat tenda. Hal ini merupakan ironi yang menyedihkan bahwa di dalam kamp UNAMID yang mana *Peacekeeping Operations* tugasnya adalah menjaga keselamatan warga, gagal menjaga warga sipil Darfur bahkan warga-warga sipil yang berada di dalam kamp perlindungannya.

Otorisasi awal untuk misi ini sendiri diberikan oleh Dewan Keamanan PBB lewat resolusi 1769 pada tanggal 31 Juli 2007, otorisasi misi diperluas hingga tahun 2017 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1828 tahun 2008, Resolusi 1881 tahun 2009, Resolusi 1935 tahun 2010, Resolusi 2003 pada tahun 2011, dan Resolusi 2063 tahun 2012, Resolusi 2113 Tahun 2013, Resolusi 2173 tahun 2014, Resolusi 3228 tahun 2015, Resolusi 2296 tahun 2016, dan Resolusi 2363 tahun 2017. Resolusi Dewan Keamanan 2113 tanggal 30 Juli 2013 memperpanjang mandat UNAMID selama 13 bulan - sampai 31 Agustus 2014 ,tetapi kali ini mengurangi jumlah personil menjadi 16.200 personil militer, tahun selanjutnya, mandat tersebut diperpanjang lagi sampai 30 Juni 2015 (resolusi Dewan Keamanan 2173 pada tanggal 27 Agustus 2014), Resolusi Dewan Keamanan 2228 tanggal 29 Juni 2015 sendiri mengurangi kembali jumlah pasukan menjadi 15.845 personil militer, misi ini terus mengalami perpanjangan dan perubahan personel sebagai upaya meningkatkan upaya penyelesaian konflik dan pengembalian perdamaian yang tak kunjung datang (DK PBB 2015).

Meskipun sudah memperpanjang mandatnya PKO UNAMID ini dinilai gagal oleh banyak pihak, masih tingginya tingkat korban di Darfur, dan belum adanya tanda-tanda perdamaian walaupun adanya UNAMID membuat banyak pihak skeptis terhadap UNAMID, angka kematian yang tinggi di kamp UNAMID, gagalnya UNAMID memproses kasus pemerkosaan di Tabit, dan gagalnya UNAMID dalam mengatasi pencegahan bus oleh pemberontak yang berakhir pada penculikan warga Darfur dinilai sebagai bukti nyata kegagalan UNAMID.

Berawal dari kegagalan-kegagalan tersebut, dan juga mengingat pentingnya peran UNAMID sebagai PKO PBB yang bertugas menjaga kedamaian dan melindungi warga sipil, maka penelitian ini ditulis guna menganalisa sebab-sebab kegagalan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka muncul rumusan masalah yaitu, “Mengapa UNAMID gagal melaksanakan mandatnya di Darfur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulisan untuk menjelaskan penyebab gagalnya *Peacekeeping Operations* PBB yaitu UNAMID yang dalam mengatasi kasus di Darfur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini mencoba menjelaskan penyebab gagalnya operasi *Peacekeeping Operations* yang dikeluarkan oleh PBB yaitu UNAMID di Darfur. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta memperkaya wawasan akademisi hubungan internasional dalam menganalisa topik atau tema serupa.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan memberikan masukan pada PBB khususnya di bidang *Peacekeeping Operations* di Darfur dengan menyediakan analisa mengenai penyebab gagalnya UNAMID dalam mengatasi konflik di Darfur sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk pengadaan UNAMID yang lebih baik kedepannya.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Realisme

Perspektif realisme berasumsi dasar mengenai pesimisme dan skeptisisme terhadap sifat dasar manusia. Pesimisme dan skeptisisme tersebut terutama tentang peluang yang sangat kecil dalam kemajuan politik internasional dan politik domestik, yang kemudian dapat disebut sebagai asumsi kedua. Asumsi dasar ketiga adalah bahwa dunia ini sebenarnya terdiri atas negara-negara berdaulat yang saling terlibat konflik anarkis. Perang lah yang kemudian

menjadi penyelesaian dari konflik tersebut. Asumsi keempat adalah menjunjung tinggi keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara (Jackson & Sorensen 1999). Dalam hubungan internasional sendiri, negara berperilaku rasional dengan mengedepankan kepentingan nasionalnya, jadi segala sesuatu yang dilakukan negara dalam hubungan internasional bertujuan untuk mengejar kepentingan utama yang membentuk *power* (Dugis 2016)..

Bagi realis, politik global berkaitan tentang kekuatan dan kepentingan pribadi. Inilah sebabnya mengapa sering digambarkan sebagai model 'politik kekuasaan' politik internasional. Hans Morgenthau (diambil dari Jackson & Sorensen 1999) mengatakan bahwa politik adalah perjuangan untuk menguasai manusia, dan yang paling utama tujuannya adalah kekuatan, cara memperoleh, mempertahankan dan mendemonstrasikannya menentukan teknik tindakan politik '. Teori Politik kekuasaan didasarkan pada dua asumsi utama, menurut pandangan Donnelly (2000) :

1. Orang pada dasarnya egois dan kompetitif, artinya egoismelah yang mendefinisikan karakteristik sifat manusia.
2. Sistem negara beroperasi dalam konteks anarki internasional, yang berarti tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara berdaulat.

Adanya Organisasi internasional telah mengubah politik kekuasaan tradisional , dan disaat bersamaan, mengancam munculnya *superstate global* atau regional, hal ini memunculkan pandangan Realist mengenai organisasi Internasional, Realis sangat skeptis terhadap organisasi internasional dan memandang bahwa organisasi internasional tidak efektif, Realist juga mempertanyakan otoritas mereka. Kelemahan dari Organisasi internasional adalah fakta bahwa politik internasional terus dicirikan oleh sebuah pencarian kekuasaan dan kepentingan di antara semua negara, oleh karena pencarian kepentingan inilah tidak akan bisa tercapainya harmoni kepentingan bersama, yang menjadikan organisasi internasional sulit berkembang menjadi badan yang signifikan, Selain itu, pertumbuhan organisasi internasional dianggap

tidak diinginkan karena kekhawatiran akan mengancam kedaulatan negara (Heywood 2011).

Jika PBB terus memperluas kegiatannya, maka kedaulatan nasional akan semakin sempit, sementara gagasan tentang komunitas internasional dan kewajiban anggotanya akan meningkat, komunitas atau masyarakat internasional sekali lagi akan selalu menjadi yang dikorbakan jika dihadapkan dengan kepentingan nasional, terutama aktor-aktor negara yang dominan, dengan sebuah kesimpulan awal, Neack (1995) berpendapat bahwa interpretasi realis lebih baik menjelaskan partisipasi negara (pada organisasi internasional), penjelasan realis mengenai partisipasi negara dalam menjaga perdamaian PBB adalah bahwa negara melakukan apapun yang mereka bisa, dengan menggunakan seluruh sumber daya dan kekuatan mereka, untuk melindungi kepentingan nasional mereka.

Kaum realis menggunakan keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara sebagai dasar normatif penyebaran doktrin dan pengambilan kebijakan luar negerinya. Pandangan umum dari Realis adalah bahwa Negara adalah aktor utama di dunia internasional yang bergerak untuk tujuan keamanan termasuk mempertegas kekuatannya dengan berbagai cara, dunia ini dipandang Realist sebagai anarki, sehingga keberadaan IGO seperti PBB dinilai tidak relevan, apalagi dengan adanya *Peacekeeping Operations*, Realis tidak menaruh banyak kepercayaan pada PBB. Sebagian besar IGO yang ada, berdiri untuk memenuhi kepentingan negara, bahwa negaralah yang mendirikan mereka, negara juga yang memberikannya kewenangan (Norton t.t).

Jika pemimpin negara melihat kepentingan negara mereka yang tidak dapat dipisahkan terkait dengan kelanjutan status quo internasional, mereka akan mendukung dan mempertahankan status quo. Kepentingan khusus yang telah dilayani oleh penjaga perdamaian PBB adalah kepentingan negara-negara Barat yang kepentingannya bergantung pada status quo, PKO sendiri sering dikaitkan dengan kewajiban *Responsibility to Protect*, bahwa semua negara harus memegang prinsip perdamaian universal, yang tentu saja realist

menentang akan prinsip universal ini, Realist tidak mempercayai adanya PKO sebagai 'penjaga perdamaian', adanya PKO bagi Realist merupakan bentuk dominasi Negara-negara yang memiliki kepentingan dalam pemeliharaan perdamaian, dan mungkin akan terus melakukannya sebagai sarana untuk mengendalikan sistem masyarakat internasional (Neack 1995).

Realist berargumen bahwa Hubungan Internasional terbentuk oleh sistem kompetensi antar negara yang dipacu oleh keinginan akan kekuatan dan keamanan, peran dari organisasi internasional sangat minim untuk mempengaruhi perilaku negara, teori ini tercermin dalam PKO PBB karena walaupun tugas utamanya memelihara perdamaian, namun sering gagal tugas utama ini karena adanya kepentingan nasional (Boll 2007). Penjelasan realis diidentifikasi sejalan dengan pendapat Neack (1995), yang mengatakan bahwa kontributor utama PKO adalah negara bagian yang telah berusaha untuk menjadikan negara mereka sebagai kekuatan global, *Peacekeeping*, oleh karena itu, adalah cara bagi negara menegaskan perannya di panggung dunia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Statecraft dan kepentingan nasional realist dalam penelitian mengenai kegagalan *peacekeeping operations* di Darfur.

Statecraft dan Kepentingan Nasional

Morgenthau (diambil dari Heywood 2011) memberi penekanan pada '*Art of statecraft*', dengan alasan bahwa perilaku praktis politik seharusnya dilakukan berdasarkan 'enam prinsip realisme politik':

1. Politik diatur oleh hukum objektif yang berakar pada *human nature*
2. Kunci untuk memahami politik internasional adalah konsep kepentingan Didefinisikan dalam hal kekuasaan
3. Bentuk dan sifat kekuasaan negara akan bervariasi dalam waktu, tempat dan - konteks, namun konsep kepentingan akan tetap konsisten.

4. Prinsip moral universal tidak mendasari perilaku negara, meskipun demikian, tidak mengesampingkan kesadaran akan pentingnya moral tindakan politik.
5. Aspirasi moral secara khusus ditunjukkan kepada untuk negara tertentu; Tidak ada yang kesepakatan universal akan perangkat prinsip moral.
6. Bidang politik bersifat otonom, yang berarti pertanyaan utama dalam politik internasional adalah 'Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kekuasaan bangsa? '

Hal utama dalam *statecraft* dalam tradisi realis adalah kepentingan nasional yang berhubungan dengan sikap realis mengenai moralitas politik. Realisme biasanya digambarkan sebagai amoral, hal ini dikarenakan realis dalam mengejar kebijakan luar negerinya mengabaikan konsiderasi etika demi mengejar kepentingan nasional (Heywood 2011).

Teori Realist dengan konsep kepentingan nasional ini dapat dijadikan sebagai analisa tindakan negara dalam bergabung menerjunkan PKO yang dipandang Realist semata-mata bukan karena menjaga perdamaian dunia, namun karena adanya kepentingan nasional dan juga dijadikannya penurunan PKO ini sebagai ajang 'panggung dunia' kekuatan-kekuatan negara besar, hal ini tidak lepas adanya dengan fakta bahwa PBB melalui Dewan Keamanannya adalah satu-satunya badan yang berwenang menyelenggarakan penerjunan *Peacekeeping Operations* yang Dewan Keamanan ini beranggotakan lima negara besar yang sarat akan kepentingan, namun disisi lain PBB sebagai organisasi yang satu-satunya menyelenggarakan PKO ini juga makin dipertanyakan kredibilitasnya dan supremasinya terhadap negara.

1.5.2 Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan data dan informasi salah satunya dari penelitian sebelumnya, yaitu skripsi, guna dijadikan bahan pembandingan, dan juga guna mendapatkan informasi terkait penelitian penulis.

1. Skripsi Gita Arji Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 2010 berjudul, "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur-Sudan" .

Rumusan masalah di penelitian ini menjelaskan tentang Peranan PBB dan Uni Afrika dalam penyelesaian konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*), hasil penelitian sendiri menyatakan bahwa dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar dua operasi penjagaan perdamaian yaitu *United Nation Mission in the Sudan* (UNMIS) dan *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) yang dinyatakan berhasil membawa Sudan menuju perdamaian dengan parameter ditandatanganinya perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dan Pemberontak pada tanggal 23 Februari 2010.

2. Skripsi Petrus Krisologus Jullio Sambu See, Fakultas Hukum, program kekhususan hukum tentang Hubungan Internasional, Universitas Atma jaya, dengan judul "Peranan Unamid Dalam Mengatasi Konflik Bersenjata antara Kelompok Pemberontak di Darfur dengan Pemerintahan Sudan", Penelitian ini berusaha menganalisa peran UNAMID dalam menyelesaikan konflik di darfur dengan bahan yang terdiri dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam Organisasi Kesatuan Afrika, tindakan Konstitusional Uni Afrika, Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan 1769. Hasil penelitian di dalam tulisan ini dan menyimpulkan bahwa pembentukan UNAMID di Darfur dinyatakan oleh penulis telah berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan.

3. Skripsi Ihsan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “ Peran Uni Afrika dalam Resolusi Konflik Darfur 2004-2007” . Skripsi ini berupaya menganalisa Peran Uni Afrika dalam resolusi konflik Darfur, hasil dari temuan penelitian skripsi menyatakan bahwa Uni Afrika dinilai gagal dalam menyelesaikan konflik di Darfur karena, keterbatasan mandat, tidak diijinkannya Uni Afrika menggunakan *deadly force*, dan peralatan logistik yang tak memadai.

Bisa kita lihat dari ketiga skripsi diatas bahwa tidak satupun penelitian-penelitian tersebut berfokus membahas kegagalan UNAMID di Darfur pada 2008-2015, skripsi Gita Arji Pratama dan Petrus Krisologus Jullio Sambi See melihat dari segi hukum (*normative legal*) dengan hasil penelitian bahwa UNAMID di Darfur dinyatakan oleh penulis telah berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan, yang mana sangat bertolak belakang dengan penelitian penulis yang membahas kegagalan UNAMID, lalu skripsi selanjutnya oleh Ihsan, memiliki kesamaan dengan menulis dikarenakan pada hasil akhir penelitian menyimpulkan kegagalan pasukan penjaga perdamaian, namun disini penelitian Ihsan berbeda periode yaitu 2004-2007 yang mana Ihsan membahas mengenai keterlibatan *African Union* sebagai penjaga perdamaian di Darfur, berbeda dengan penulis yang memilih periode 2008-2015 dengan fokus membahas kegagalan *Peacekeeping Operations* oleh UNAMID di Darfur.

1.6 Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis memiliki pegangan hipotesis awal yaitu kegagalan dari UNAMID di Darfur ini karena PBB sebagai lembaga yang menurunkan *Peacekeeping Operations* ini penuh akan kepentingan pribadi Negara dibanding rasa kemanusiaan dan kemauan kuat untuk menjaga perdamaian internasional yang menjadi prinsip utama operasi *peacekeeping*, sehingga PBB sendiri tidak bisa sebagai organisasi dunia dengan otonomi

tertinggi tidak melakukan tugasnya dengan maksimal karena kepentingan negara menghalangi misi perdamaian di Darfur.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif, penelitian kualitatif dicirikan oleh tujuan yang berhubungan dengan pemahaman beberapa aspek kehidupan sosial, dan metode yang (pada umumnya) menghasilkan kata-kata, bukan angka, sebagai data untuk analisis, metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 'Apa', 'Bagaimana' atau 'Mengapa' terhadap sebuah fenomena (Bricki & Green 2007).

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 *Peacekeeping Operations*

Peacekeeping Operations dipimpin oleh *Departement of Peacekeeping Operations* (DPKO), dan bekerja untuk menciptakan kondisi perdamaian abadi di negara yang dilanda konflik. PKO memiliki kekuatan yang unik, termasuk legitimasi, pembagian beban, dan kemampuan untuk menempatkan dan mempertahankan pasukan serta polisi dari seluruh dunia, mengintegrasikannya dengan penjaga perdamaian sipil untuk menjalankan mandat multidimensional. PKO PBB memberikan keamanan dan dukungan bagi pembangunan politik dan perdamaian untuk membantu negara-negara dalam proses transisi awal yang sulit dari konflik ke perdamaian. *Peacekeeping Operations* PBB dipandu oleh tiga prinsip dasar:

1. *Consent of the parties*
2. *Impartiality*
3. *Non-use of force except in self defence and defence to the mandate*

1.7.1.2 Mandat Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan merupakan salah satu organ utama PBB, DK memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ancaman pada perdamaian dan keamanan internasional, Menurut Piagam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki

empat tujuan, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah internasional dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa. Semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Sementara organ lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota, Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang harus diimplementasikan oleh negara-negara anggota PBB. Salah satu wewenang DK adalah pengerahan operasi penjaga perdamaian PBB yang didasarkan mandat dari Dewan Keamanan. Selama bertahun-tahun, rentang tugas yang ditugaskan pada operasi pemelihara perdamaian PBB telah meningkat secara signifikan sebagai tanggapan terhadap pergeseran pola konflik dan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional (PBB t.t.) .

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 *Peacekeeping Operations*

DK PBB menurunkan *Peacekeeping Operations* yang dinamakan UNAMID yang merupakan gabungan dari African Union dan United Nations yang berjumlah 19,248 (PBB t.t.), adapun tugas dari UNAMID:

1. Melindungi personil, fasilitas, instalasi dan peralatan, dan untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak personil sendiri dan pekerja kemanusiaan;
2. Mendukung pelaksanaan yang efektif dari Perjanjian Perdamaian Darfur, mencegah gangguan pelaksanaannya dan serangan bersenjata, dan melindungi warga sipil, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan.

1.7.2.2 Mandat Dewan Keamanan PBB

UNAMID Bertindak atas mandat dari Dewan Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 1769 31 Juli 2007 yang memutuskan bahwa UNAMID berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dalam bidang penempatan pasukan dan yang dianggap dalam kemampuan untuk:

1. Melindungi personil, fasilitas, instalasi dan peralatannya, dan untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak personil dan pekerja kemanusiaannya sendiri.
2. Mendukung pelaksanaan Perjanjian Darfur Darfur secara dini dan efektif, mencegah terganggunya pelaksanaan implementasi dan serangan bersenjata, dan melindungi warga sipil, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan.

Dewan juga memutuskan bahwa mandat UNAMID harus sesuai dengan yang tercantum dalam paragraf 54 dan 55 laporan Sekretaris Jenderal dan Ketua Komisi Uni Afrika [S / 2007/307 / Rev.1] Dokumen PDF dari 5 Juni 2007, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk berkontribusi pada pemulihan kondisi keamanan yang diperlukan untuk penyediaan bantuan kemanusiaan yang aman dan untuk memfasilitasi akses kemanusiaan penuh di seluruh Darfur;
2. Untuk berkontribusi pada perlindungan populasi sipil di bawah ancaman kekerasan fisik nyata dan mencegah serangan terhadap warga sipil, dalam kemampuan dan wilayah penerjunannya, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan;
3. Memantau, mematuhi kepatuhan dan memverifikasi pelaksanaan berbagai perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani sejak tahun 2004, serta membantu pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Darfur dan kesepakatan berikutnya;

Untuk membantu proses politik guna memastikan hal tersebut inklusif, dan untuk mendukung mediasi bersama Uni Afrika-Perserikatan Bangsa-Bangsa

dalam upayanya untuk memperluas dan memperdalam komitmen terhadap proses perdamaian; (PBB t.t.).

1. Memberikan kontribusi pada lingkungan yang aman untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi, serta kembalinya pengungsi ke rumah mereka secara berkelanjutan;
2. Memberikan kontribusi untuk promosi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Darfur;
3. Untuk membantu dalam mempromosikan peraturan hukum di Darfur, termasuk melalui dukungan untuk memperkuat peradilan yang independen dan sistem penjara, dan bantuan dalam pengembangan dan konsolidasi kerangka hukum, dengan berkonsultasi dengan pihak berwenang Sudan yang relevan;
4. Untuk memantau dan melaporkan situasi keamanan di perbatasan Sudan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah

1.7.3 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif sendiri menjelaskan tentang *nature* hubungan tertentu, uji hipotesis memberikan pemahaman hubungan yang ada antara variable (Harvard t.t.). Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang penyebab operasi UNAMID di Darfur mengalami kegagalan dengan menggunakan teori Realisme.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Pembahasan penelitian ini dibatasi oleh Operasi UNAMID di Darfur yang berlangsung pada tahun 2008-2017.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1.7.5.1 Data Primer

Data Primer dikumpulkan dengan wawancara, adapun penulis melakukan wawancara dengan Reinhard Hutagaol Wakil Komandan Team Advance

FPU UNAMID 2008, serta Ahmed H Adam yang merupakan negosiator Darfur dan Asosiasi Peneliti di SOAS University.

1.7.5.2 Data Sekunder

Penulis juga mengumpulkan data berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan memperoleh dan menelaah data yang didapat dari jurnal, buku, artikel dari internet dengan sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, laporan, dan skripsi terkait.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam penelitian ini, adapun penelitian kualitatif menurut BMJ (1997) yaitu, Penelitian kualitatif dimulai dengan niat untuk mengeksplorasi area tertentu, mengumpulkan "data", dan menghasilkan gagasan dan hipotesis dari data ini, sebagian besar melalui apa yang dikenal sebagai penalaran induktif, penelitian kualitatif yang baik, dengan menggunakan pilihan metode pengumpulan data, benar-benar harus menyentuh inti dari apa yang terjadi. Validitas metode kualitatif sangat ditingkatkan dengan menggunakan kombinasi metode penelitian.

Dalam melakukan penelitian penulis menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu wawancara, studi pustaka dan lainnya, setelah itu penulis akan melakukan hal-hal berikut.

1.7.6.1 Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data dari wawancara, artikel, buku, jurnal, dan laporan, penulis akan memilah data, dan hanya menggunakan data yang benar-benar diperlukan di penelitian, hal ini bertujuan agar penelitian tetap terarah pada fokus dan batasan yang sudah ditetapkan penulis.

1.7.6.2 Penyajian Data

Data yang sudah dipilih dari proses reduksi data kemudian disusun menjadi data yang dapat berupa grafik, bagan dan deskripsi.

1.7.6.3 Verifikasi Data

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya yang akan dilakukan penulis yaitu menguji kebenaran dan validitas data yang ada, hal ini bertujuan agar penelitian bisa terjaga kredibilitasnya.

1.7.6.4 Penerikan Kesimpulan

Penulis akan menarik kesimpulan serta verifikasi data, hal ini sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan, kesimpulan sendiri berupa kalimat yang menjelaskan mengenai hasil penelitian.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis bagi menjadi empat bab untuk mempermudah proses penelitian dan bagi pembaca mempermudah untuk mendalami penelitian ini.

Bab I : Bab ini terdiri belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian yang mencakup definisi konseptual dan definisi operasional, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini akan berisi mengenai ‘Konflik Darfur’, yang akan menjelaskan sejarah Sudan hingga munculnya konflik Darfur serta Organisasi Internasional yang terlibat dalam misi perdamaian di Darfur .

Bab III: Akan membahas mengenai ‘Kegagalan PKO PBB di Darfur’ yang akan menjelaskan tentang latar belakang PKO, serta kegagalan PKO di Darfur yang akan dijelaskan menggunakan teori Realisme.

Bab IV: Bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran Penulis bagi peneliti selanjutnya dan juga saran untuk PBB .